

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit ✓	Halaman : 06
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabungan	

Evaluasi dan Tata Kembali Aset Pemerintah

SAMPIT — Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir mendesak agar pemerintah kabupaten tertib dalam hal menata kembali aset pemerintah.

Hal ini dalam rangka menjaga dan mempertahankan aset milik pemerintah, yang selama ini masih belum terdata dan dikuasai pihak lain. Selain itu, ini juga upaya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Mendorong agar aset - aset yang ada dikuasai pihak lain, bisa di data dan dilakukan inventarisasi. Ini jangan sampai aset pemerintah dikuasai swasta, tidak ingin lagi aset ini dibiarkan begitu saja,” katanya.

Abdul Kadir menegaskan, jika pengelolaan aset yang masih semrawut ini, tentunya selalu jadi catatan dari BPK. Maka dari itu

perlu keberanian dan ketegasan dari pemerintah. Misalnya untuk penyalahgunaan rumah dinas di sekolahan hingga aset sekolah seperti tanah harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

“Jangan ada juga penyalahgunaan dari aset itu, seperti aset di sekolah dialih fungsikan jadi warung atau toko sejenisnya. Ini yang harus dibenahi secara total supaya tidak selalu jadi catatan merah untuk

Kotim kedepannya,” tegas mantan Ketua Komisi II tersebut.

Ia menyarankan jika di website pemerintah kabupaten itu, mempublikasikan aset milik pemerintah ini, supaya aset terjaga dan masyarakat tahu.

“Kalaupun ada yang ingin mengalihkan aset itu secara diam - diam, maka akan mudah diketahui, dan publik yang akan memberikan penekanan kepada oknum itu,” tandasnya. (ang/fin)